

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Sepakat RAPBD 2023 Rp 82,5 Triliun

► Heru Beberkan Cara Tingkatkan Pendapatan Daerah

Gambir, Warta Kota

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, saat berlangsungnya Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/11/2022).

Hal tersebut ia sampaikan setelah terbentuknya kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif terkait MoU Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2023.

Dalam kesempatan itu, Heru menjelaskan kebijakan umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Heru mengatakan, kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan transfer serta dari pendapatan daerah yang sah.

"Dalam kebijakan pajak daerah ini terdapat pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah; pemutakhiran data melalui sensus pajak daerah; penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah; pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment," ujar Heru dalam pidatonya.

Kemudian, terdapat pula law enforcement dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang, perubahan peraturan terkait pajak daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan.

"Lalu, melalui ekstensifikasi pajak daerah, kebijakan yang kami ambil juga berdasarkan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi, di antaranya pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat," ucap Heru.

Dalam kesempatan itu, Heru menjelaskan kebijakan umum dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Selain itu, ada penyesuaian harga BBM, pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan penjualan properti rata rata meningkat, serta juga memperhatikan perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT.

Selanjutnya, Heru pun menyampaikan kepada seluruh peserta rapat paripurna terkait apa saja kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke depan, mengenai kebijakan retribusi daerah.

Hal tersebut meliputi pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik, serta menerapkan banking system dalam melakukan pembayaran retribusi daerah.

Adapun total RAPBD TA 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta yakni sebesar Rp. 82,54 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan APBD TA 2022 sebesar Rp. 82,47 triliun. Heru pun merincikan rencana pendapatan daerah TA 2023 adalah sebesar Rp. 74,41 triliun.

"Ini diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 52,68 triliun; pendapatan transfer sebesar Rp 18,45 triliun; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 3,27 triliun," pungkas Heru. (m36)